

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK: PERAN DINAS KOPERASI UMKM KOTA METRO DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI SIKP UNTUK KUR

Annisa Erlitsya Marchelina¹

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Jl. Prof Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Email: nisamarche@gmail.com

ABSTRACT

The problem of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as business actors is the capital used to develop the business. The development of MSMEs is the government's responsibility to empower the community through the KUR program. KUR program issued by the government in 2007. Credit KUR is capital or investment to debtors, business entities or productive business groups through the SIKP application which is used as a means of paying credit subsidy bills. The MSME Cooperative Service helps facilitate, provide training and guidance for the development of MSMEs in Metro City. This research uses literature review, citations and reference articles. The results of the study concluded that the MSME Cooperative Service reached out to the Trade Office, the Tourism Office, and the Agriculture and Livestock Service to upload data to the SIKP application to make it easier for prospective debtors (SME business actors) to get bank channel credit.

Keywords : Role, Dinas UMKM, SIKP, KUR

I. PENDAHULUAN

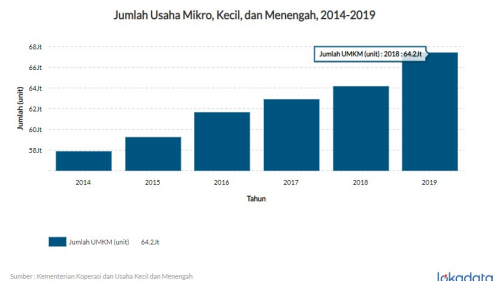
Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari adanya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, langkah pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha internal untuk mengembangkan usaha secara kreatif. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu agen pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi untuk pelaku UMKM agar memiliki usaha yang tangguh dan mandiri (Yazfinedi, 2018).

UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha yaitu a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (PP RI Nomor 7 Tahun 2021).

Jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Berdasarkan data mengenai jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun 2014-2019 menunjukkan

peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini.

Gambar 1. Jumlah UMKM Tahun 2014-2019



Sumber: lokadata.id

Berdasarkan gambar 1 tentang jumlah UMKM tahun 2014-2019 dijabarkan sebagai berikut, pada tahun 2014 jumlah unit UMKM sebanyak 57,9 juta, tahun 2015 jumlah unit UMKM sebanyak 59,3 juta, tahun 2016 jumlah unit UMKM sebanyak 61,7 juta, tahun 2017 jumlah unit UMKM sebanyak 62,9 juta, tahun 2018 jumlah unit UMKM sebanyak 64, 2 juta dan tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah unit yang cukup sebesar 67,4 juta.

Perkembangan UMKM yang terus meningkat berasal dari masyarakat yang berkeinginan mendapatkan penghasilan serta mengembangkan kemampuan dalam usaha. Mendirikan UMKM membutuhkan dukungan dari sisi anggaran yaitu modal, keterampilan, sarana dan prasarana untuk menjamin perkembangan UMKM yang sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sejahtera. Dukungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkerjasama untuk menyediakan fasilitas serta pelatihan pengembangan usaha melalui kreatifitas sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional. Syarat untuk mendapatkan mendirikan UMKM harus memiliki surat izin perdagangan (SIUP) sebagai pelaku usaha dan memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cara mendaftar online.

Dinas Koperasi UMKM adalah (SKPD) Satuan Kerja Pelaksana Daerah Pemerintah Kota dalam pembinaan, pengembangan Koperasi dan UMKM serta menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian di bidang koperasi termasuk UMKM dengan memberikan informasi, pelatihan, dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola dan mengembangkan usaha menjadi dinamis (Nirwana et al., 2017). Dinas Koperasi UMKM menjadi wadah dalam mengembangkan UMKM dengan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha, langkah yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM yaitu memberikan pelatihan berupa strategi untuk memasarkan produk, karena berkembangnya UMKM harus diiringi dengan produk-produk yang berkualitas.

Secara krusial pelaku usaha membutuhkan modal/pendanaan sebagai jalan untuk mengembangkan usahanya. Pada tahun 2007 Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah sebagai bentuk kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. KUR adalah kredit/modal kerja atau investasi kepada debitur perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif seperti pertanian, perikanan, perindustrian, dan jasa keuangan simpan pinjam (Kur.ekon.go.id, 2021).

Pelaku usaha membutuhkan akses untuk mendaftar sebagai debitur dari KUR maka dibuatlah aplikasi agar mempermudah pelaksanaan KUR, hal ini muncul karena berdasarkan hasil evaluasi program KUR yang kurang tepat sasaran. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP dijadikan alat mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Koperasi UMKM dalam menggunakan aplikasi SIKP untuk KUR? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang nmengkaji tentang Aplikasi SIKP dan KUR untuk digunakan sebagai acuan pustaka penelitian yaitu: Pertama, Anggraini (2013) penelitian terkait peran KUR bagi pengembangan UMKM, Kedua, Aristanto (2019) penelitian terkait optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran KUR di Jawa Timur dan Ketiga, Mokalu penelitian tentang pemanfaatan fasilitas KUR terhadap peningkatan UMKM (2018).

II. METODE

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif diulas dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada dan cenderung menganalisis data secara induktif (Rukajat, 2018). Pada penelitian ini

menggambarkan peran Dinas Koperasi UMKM dalam menggunakan aplikasi SIKP pada KUR. Informasi yang dikumpulkan melalui metode wawancara sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian pustaka, artikel-artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM dalam bentuk pinjaman dengan agunan. Program KUR bersumber dari dana bank atau penyalur KUR. Bank penyalur yang berkerjasama dengan pemerintah pada KUR terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN dan Bank Bukopin.

Penyalur KUR dapat dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha UMKM dengan mendatangi KUR di kantor bank pelaksana dan tidak langsung dapat melalui lembaga keuangan dan koperasi. Data yang dibutuhkan bank untuk menerima debitur adalah surat izin usaha (SIUP), cara mendapatkan SIUP bagi pelaku usaha dengan mendaftarkan izin kepada Dinas setempat.

Dinas Pemerintahan Daerah/Kota menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada instansinya. Dinas yang berhubungan dengan UMKM adalah Dinas Koperasi UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian dengan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi. (Info.metrokota.go.id, 2021).

Jumlah UMKM di Kota Metro terus bertambah, data terakhir yang terupload pada sistem data metrokota menunjukkan bahwa tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 8.133 ribu dengan rincian usaha mikro berjumlah 7.086, usaha kecil berjumlah 956 dan usaha menengah berjumlah 91 pelaku usaha. Bertambahnya data pelaku UMKM ditandai dengan adanya surat izin usaha yang dimiliki oleh UMKM. Dinas Koperasi UMKM Kota Metro memiliki peran untuk membantu UMKM yang telah memiliki izin usaha untuk mengembangkan usahanya dengan pinjaman bank melalui KUR.

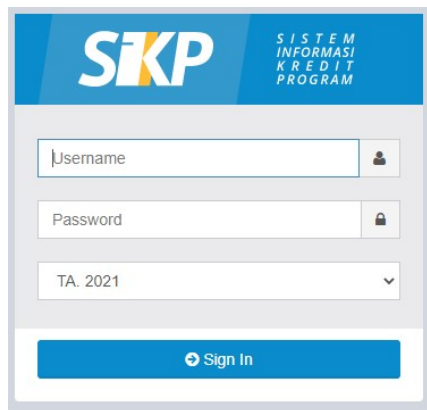
Peran menurut Sutarto (2009:139) ada tiga komponen yaitu:

- Konsepsi peran, kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- Harapan peran merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak.
- Pelaksanaan peran adalah perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya (Lantaeda, 2017).

Dinas Koperasi UMKM Kota Metro melakukan penginputan data melalui aplikasi SIKP. Aplikasi ini merupakan basis data UMKM yang terpecaja dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran pinjaman

yang efektif antara calon debitur dan debitur KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro (Kur.ekon.go.id, 2021).

Dinas Koperasi UMKM Kota Metro bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perternakan untuk mengupload data dalam aplikasi SIKP. Berikut ini gambar aplikasi SIKP yang digunakan



Gambar 2. Aplikasi SIKP

Dinas Koperasi UMKM melakukan kerjasama dengan dinas lainnya yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian dan Perternakan untuk mengupload data pelaku UMKM sesuai dengan sektornya masing masing. Kabid Dinas Koperasi UMKM menjelaskan bahwa:

“Kerjasama dilakukan untuk mempercepat proses input data UMKM dengan menunjuk perwakilan sebagai operator, sebagai contoh dinas perdagangan menginput data UMKM pada bidang perdagangan begitu juga dengan dinas lainnya”.

Dinas Koperasi UMKM telah melakukan input data dengan satu orang operator, namun dalam proses berjalannya waktu terkendala sehingga melakukan kerjasama dalam sebuah tim dari dinas terkait untuk membantu input data. Data yang dibutuhkan dalam aplikasi SIKP adalah nama pelaku usaha, nomor induk kependudukan (NIK), nomor izin, nama badan usaha, alamat usaha, modal usaha dan iuran anungan.

Kerjasama Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pariwisata dan Dinas Pariwisata mengumpulkan data untuk selanjutnya di input oleh operator melalui aplikasi SIKP. SIKP menampung seluruh data UMKM Indonesia dari berbagai provinsi, sehingga memudahkan menemukan debitur mendapatkan kreditur dari masing-masing daerah. Dinas Koperasi UMKM Kota Metro telah berhasil menginput data sebanyak 824 unit UMKM, jumlah ini masih kurang dari data keseluruhan UMKM di Kota Metro. Berdasarkan gambar rekapitulasi penyaluran KUR dijelaskan bahwa perbedaan yang signifikan mengenai jumlah debitur di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut ini

rekapitulasi penyaluran KUR oleh perbankan di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Rekapitulasi Penyaluran KUR oleh Perbankan per Penda				
No	Nama Penda	Jumlah Debitur	Total Nilai Akad	Total Nilai Outstanding
1	Kab. Lampung Selatan	20,926	575,859,668,047	396,962,500,740
2	Kab. Lampung Tengah	42,364	1,010,551,581,528	702,667,572,021
3	Kab. Lampung Utara	15,235	406,240,658,276	348,361,611,621
4	Kab. Lampung Barat	10,952	216,583,712,357	178,950,442,200
5	Kab. Tulangbawang	8,976	253,092,960,653	174,088,179,091
6	Kab. Tanggamus	13,139	370,357,523,419	284,979,062,803
7	Kab. Lampung Timur	30,316	714,051,236,229	489,226,596,007
8	Kab. Way Kanan	9,645	216,731,322,314	171,696,756,255
9	Kab. Pesawaran	6,989	204,225,413,436	152,620,282,255
10	Kab. Pringsewu	4,290	112,065,739,296	84,309,922,807
11	Kab. Mesuji	5,781	151,003,655,217	109,894,356,178
12	Kab. Tubaba	5,146	145,294,296,365	118,817,622,639
13	Kab. Pesisir Barat	5	980,000,000	938,357,677
14	Kota Bandar Lampung	14,681	475,498,085,257	364,740,421,291
15	Kota Metro	2,922	81,016,183,542	56,436,646,776
Total		191,367	4,933,552,035,936	3,634,690,330,381

Sumber Data: Aplikasi SIKP (25 November 2020)

Gambar 3. Rekapitulasi Penyaluran KUR

Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Metro dalam menggunakan aplikasi SIKP sebagai perantara bagi debitur (pelaku usaha) dan kreditur (penyalur dana). Urusan pelaku usaha (UMKM) mendapatkan pinjaman atau tidak itu tergantung dari bank penyalur karena pihak bank berhak melakukan penyeleksian untuk calon kreditur. Dinas UMKM Koperasi memiliki pemahaman yang lebih mengenai kriteria UMKM layak atau tidaknya untuk diberikan pelayanan melalui program KUR dan aplikasi SIKP ini dipergunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

IV. KESIMPULAN

Dinas UMKM telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kemajuan UMKM seperti menyediakan sarana pelatihan bagi masyarakat peningkatan strategi promosi produk dengan bantuan dari pemerintah. Dinas Dinas Koperasi UMKM telah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Pariwisata memberikan pelayanan dengan membantu UMKM untuk input data melalui aplikasi SIKP. Aplikasi SIKP menjadi fasilitas hubungan antara debitur (pelaku usaha) dengan pihak yang memberikan bantuan (penyaluran pinjaman) sehingga dapat menghasilkan usaha dengan produk yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat *Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*.

Info.metrokota.go.id. (2021). *Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian*.

Kur.ekon.go.id. (2021). *Maksud dan Tujuan KUR*. <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

Latenda, S. B. (2017). Peran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*.

Mokalu, O., Montolalu, J., & Keles, D. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
<https://doi.org/10.35797/jab.6.001.2018.19222>.

Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *KOLABORASI: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. CV Budi Utama.

Supeni, N. (2018). Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*.
<https://doi.org/10.32528/agribest.v2i1.1378>

Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*.